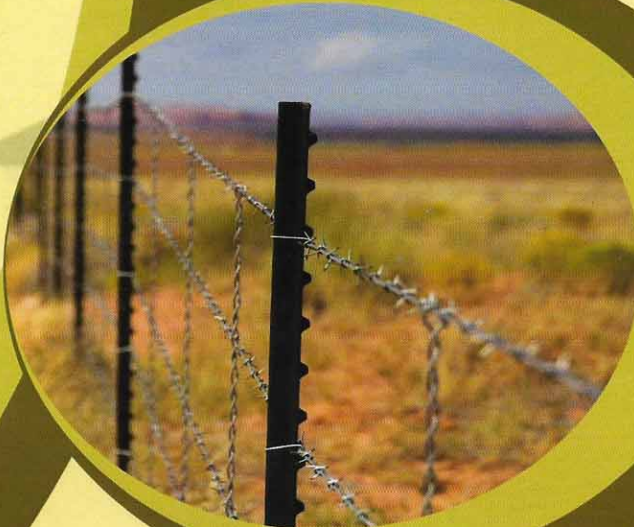


Dr. Aslan Noor, S.H., M.H., C.N.  
Lilis Ratnaningsih, S.H., M.H.



# **KONSEP PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN YURISPRUDENSI**



Aria Mandiri Publisher

Dr. Aslan Noor, SH., MH., CN

Lilis Ratnaningsih, SH.,MH

**Konsep Pembatalan Hak Atas  
Tanah Dilengkapi Dengan  
Yurisprudensi**



Penerbit Aria Mandiri Group

2019

Konsep Pembatalan Hak Atas Tanah Dilengkapi Dengan  
Yurisprudensi

Copyright © 2019 oleh Dr. Aslan Noor, SH., MH., CN  
Dan Lilis Ratnaningsih, SH.,MH

Penulis: Dr. Aslan Noor, SH., MH., CN Dan Lilis  
Ratnaningsih, SH.,MH

Penata letak: Aria Mandiri

Desain sampul: Tim Aria Mandiri

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Aria Mandiri Group

Bandung – Jawa Barat

No. Telp. 089657405447

[ariamandiri.publisher@gmail.com](mailto:ariamandiri.publisher@gmail.com)

Cetakan Pertama, September 2019

i + 390 halaman, 14 x 21

ISBN: 978-602-6616-71-5

Hak cipta dilindungi undang-undang.

All Right Reserved

## KATA PENGANTAR

Tim peneliti konsep kepemilikan tanah dan ruang bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran hak asasi manusia yang memperoleh dana hibah pada penelitian kategori PDUPT dari Dikti pada Tahun Anggaran 2019 menerbitkan buku *Yurisprudensi Mengenai pertanahan Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Konsep Pembatalan Hak Atas Tanah (Konsep Pembatalan Hak Atas Tanah Dilengkapi Dengan Yurisprudensi))*.

Buku ini berisi Konsep Pembatalan hak atas tanah dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), baik yang ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), sebagaimana terdapat dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara maupun dalam Hukum Acara Perdata.

Beberapa substansi yang menjadi fokus pembahasan terdiri dari:

1. Konsistensi putusan-putusan pengadilan di bidang Hukum Tanah khususnya mengenai Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah
2. Kritik atau komentar terhadap putusan-putusan pengadilan yang ada berdasarkan kaedah atau norma Hukum Pertanahan yang berlaku.
3. Masukan-masukan tentang penerapan aturan-aturan pertanahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Penyusunan buku bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas dan kesesuaian putusan pengadilan mengenai pertanahan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan khususnya (*Lex Specialis*) dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanahan terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah.

Bandung, September 2019

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I      PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Manfaat	6
 BAB II     TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Sejarah      Konflik      Pertanahan (Agraria) di Indonesia	8
B. Pembatalan Hak Atas Tanah	18
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	19
D. Tinjauan Umum Upaya Hukum	24
E. Putusan      Pengadilan      Yang Berkekuatan Hukum Tetap Harus Dilaksanakan	31
F. Hak Atas Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah      Dalam      Hukum Tanah Nasional	33
G. Pengertian Jual Beli Tanah	44
H. Penguasaan Atas Tanah Sebagai Bentuk dan Kewenangan Pemegang Hak	47



I.	Bentuk Hak-Hak Atas Tanah dan Wewenang yang Dimiliki Oleh Pemegang Hak Atas Tanah	49
J.	Peralihan Hak Atas Tanah	56
K.	Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Agraria	66
L.	Pendaftaran Tanah	77
M.	Sertipikat Tanah	98
N.	Hukum Acara Perdata	101
O.	Hukum Tata Usaha Negara	117
P.	Putusan Hakim: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum	139
BAB III	METODOLOGI	153
A.	Metodologi	153
B.	Pembabakan	153
BAB IV	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 121/Pdt.G/20076/Pn.Dps. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/Pdt/2008/Pt.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1462 K/Pdt/2009. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 Pk/Pdt/2012	155
A.	Tentang Duduk Perkaranya	158
B.	Pengadilan Negeri Denpasar	163

C. Pengadilan Tinggi Denpasar	171
D. Mahkamah Agung (Kasasi)	173
E. Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 121/Pdt.G/20076/Pn.Dps. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 65/Pdt/2008/Pt.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1462 K/Pdt/2009. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 Pk/Pdt/2012	175

BAB V Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 09/Pdt.G/2008/Pn.Kbm. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pdt/2009/Pt.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pdt/2010	178
A. Tentang Duduk Perkaranya	179
B. Pengadilan Negeri Kebumen	183
C. Pengadilanana Tinggi Semarang	199
D. Mahkamah Agung (Kasasi)	201
E. Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 09/Pdt.G/2008/Pn.Kbm. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 134/Pdt/2009/Pt.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 417	



<b>BAB VI</b>	Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 111/Pdt.G/1998/Pn.Pl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 43/Pdt/1999/Pt.Palu Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2000	205
	A. Tentang Duduk Perkaranya	206
	B. Pengadilan Negeri Palu	210
	C. Pengadilan Tinggi Palu	222
	D. Mahkamah Agung (Kasasi)	223
	E. Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 111/Pdt.G/1998/Pn.Pl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 43/Pdt/1999/Pt.Palu Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2000	226
<b>BAB VII</b>	Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2004/Pn.Rbi. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 67/Pdt/2005/Pt.Mtr. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Pdt/2007	228
	A. Tentang Duduk Perkaranya	229
	B. Pengadilan Negeri Raba Bima	237
	C. Pengadilan Tinggi Mataram	246

D.	Mahkamah Agung (Kasasi)	247
E.	Catatan : Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 19/Pdt.G/2004/Pn.Rbi. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 67/Pdt/2005/Pt.Mtr. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Pdt/2007	249
BAB VIII	Putusan Pengadilan Nomor 100/Pdt.G/2013/Pn.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/Pdt/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129k/Pdt/2015	251
A.	Tentang Duduk Perkaranya	252
B.	Pengadilan Negeri Palembang	262
C.	Pengadilan Tinggi Palembang	280
D.	Mahkamah Agung (Kasasi)	283
E.	Catatan : Putusan Pengadilan Nomor 100/Pdt.G/2013/Pn.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/Pdt/2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129k/Pdt/2015	297
BAB IX	PENUTUP	299
A.	Kesimpulan	299
B.	Saran	302

DAFTAR PUSTAKA

303

LAMPIRAN

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016

313

# KONSEP PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN YURISPRUDENSI



**Aria Mandiri Group**

Jalan Babakan Priangan No. 26  
Bandung 40255

Facebook: Aria Lestari

Instagram: aria.lestari

Email: ariamandiri.publisher@gmail.com

ISBN



978-602-6616-71-5